

# **KEBUDAYAAN SUNDA: ANTARA MITOS DAN REALITAS**

Oleh  
Reiza D. Dienaputra

**Makalah**  
disampaikan sebagai materi presentasi  
dalam Seminar Nasional, dengan tema,  
“Menggugat Budaya Sunda: Perspektif Periferal”,  
yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Mahasiswa Bogor  
Daerah Istimewa Yogyakarta (PAMOR RAYA), bertempat  
di Balai Utari Mandala Bhakti Wanitatama,  
Yogyakarta, 20 Oktober 2003

# **KEBUDAYAAN SUNDA: ANTARA MITOS DAN REALITAS**

Oleh  
Reiza D. Dienaputra

---

Manakala berbicara tentang Kebudayaan Sunda, pada tahapan awal saja sudah banyak permasalahan yang akan muncul. Oleh karenanya sebelum sampai pada pembahasan tentang substansi Kebudayaan Sunda, pembicaraan sudah akan menjadi hangat ketika timbul pertanyaan tentang makna Sunda dalam Kebudayaan Sunda. Sunda dalam Kebudayaan Sunda apakah dipahami sebagai sebuah etnisitas atau sebagai wilayah geografis. Manakala Sunda dipahami sebagai sebuah wilayah geografis maka untuk menetapkan mana yang dimaksud wilayah atau tanah Sunda bukanlah merupakan hal yang mudah. Jawa Barat sebagai tempat bermukimnya *urang* Sunda tidaklah lantas dapat dikatakan sebagai wilayah Sunda. Era otonomi daerah yang kini bergerak kencang semakin memperlihatkan sulitnya wilayah Jawa Barat untuk dapat dikatakan sebagai tanah Sunda.<sup>1</sup> Oleh karenanya sekali lagi, untuk menetapkan sebuah wilayah geografis yang bernama wilayah Sunda bukanlah merupakan hal yang mudah, malahan bila hal tersebut dilakukan dengan tidak hati-hati bisa jadi akan menimbulkan kegoncangan yang cukup serius. Lantas, kalau memang Jawa Barat sudah sulit untuk direpresentasikan sebagai tanah Sunda, masih adakah wilayah yang bisa dinamakan sebagai tanah Sunda atau daerah manakah sebenarnya yang bisa dikatakan sebagai tanah Sunda. Dalam katan ini, Edi S.

---

<sup>1</sup> Berdirinya Propinsi Banten pada tanggal 4 Oktober 2000 menjadi pertanda lebih jelas bahwa Jawa Barat memang tidak bisa diidentikan sebagai wilayah atau tanah Sunda.

Ekadjati mengatakan bahwa tanah Sunda merujuk pada bekas wiyah Kerajaan Sunda Pajajaran, yang kemudian berdiri sendiri, yakni Sumedang Larang, Banten, Cirebon, dan Galuh. Sumedang Larang dan Galuh kemudian menjadi satu wilayah kesatuan dengan nama Priangan. Dalam perkembangan berikutnya, Priangan sering dikatakan sebagai pusat tanah Sunda.<sup>2</sup>

Selanjutnya, apabila Sunda dipahami sebagai sebuah etnisitas maka permasalahannya tidaklah serumit mendefinisikan wilayah atau tanah Sunda. Dalam kaitan ini, *urang* Sunda secara sederhana dapat diartikan sebagai orang yang mengaku dirinya dan diakui oleh orang lain sebagai orang Sunda.<sup>3</sup> Dalam pengertian tersebut setidaknya tercakup dua kriteria besar yang dapat dijadikan pegangan untuk menyebut seseorang sebagai *urang* Sunda atau bukan *urang* Sunda. Kriteria pertama didasarkan atas keturunan atau hubungan darah. Dengan demikian, seseorang dikatakan *urang* Sunda apabila orang tuanya, baik dari pihak ayah maupun ibu, atau keduanya adalah orang Sunda, terlepas dimana ia berada atau dibesarkan. Kriteria kedua didasarkan atas sosial budaya. Seseorang dikatakan *urang* Sunda apabila ia dibesarkan dalam lingkungan sosial budaya Sunda dan dalam hidupnya menghayati serta mempergunakan norma-norma dan nilai budaya Sunda. Dalam kriteria kedua ini, yang dianggap penting adalah tempat tinggal, kehidupan sosial budaya, dan sikap orangnya.<sup>4</sup> Permasalahan tentang *urang* Sunda ini barulah muncul manakala akan menetapkan kriteria yang akan digunakan untuk menentukan *urang* Sunda. Dalam kaitan ini, memang sering timbul perdebatan yang terpolarisasi dalam dua kutub besar; kutub yang menggunakan kedua kriteria sebagai dasar untuk

---

<sup>2</sup> Edi S. Ekadjati. 1995. Kebudayaan Sunda (Suatu Pendekatan Sejarah). Jakarta: Pustaka Jaya, hal.7-8.

<sup>3</sup> Suwarsih Warnaen, et.al. 1987. Pandangan Hidup Orang Sunda. Bandung: Bagian Proyek Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Sunda (Sundanologi) Depdikbud, hal. 1.

menetapkan *urang* Sunda dan kutub yang hanya menentukan salah satu kriteria sebagai dasar untuk menentukan *urang* Sunda. Perdebatan akan semakin meruncing manakala memasuki wilayah politik, terutama berkaitan dengan perebutan kursi kekuasaan. Bila Sunda dalam kekuasaan Sunda dipahami sebagai sebuah etnisitas semata, maka Kebudayaan Sunda adalah merupakan hasil karya, karsa, dan cipta *urang* Sunda.

### **Daya Hidup dan Mutu Hidup**

Budayawan W.S. Rendra sewaktu berlangsungnya Kongres Kebudayaan IV di Jakarta, 29 Oktober – 3 November 1991, mengemukakan bahwa setidaknya ada tujuh daya hidup yang harus dimiliki oleh sebuah kebudayaan. Pertama, kemampuan bernafas. Kedua, kemampuan mencerna. Ketiga, kemampuan berkoordinasi dan berorganisasi. Keempat, kemampuan beradaptasi. Kelima, kemampuan mobilitas. Keenam, kemampuan tumbuh dan berkembang. Ketujuh, kemampuan regenerasi. Kemampuan bernafas dalam kebudayaan dimaknai sebagai kemampuan untuk mengolah hawa menjadi prana, menjaga kebersihan udara, mengharmonikan kegiatan kehidupan dengan irama nafas, serta menghilangkan hal-hal yang menimbulkan ketegangan pada pikiran yang berarti menimbulkan kesesakan pada nafas kehidupan. Kemampuan mencerna dimaknai sebagai kemampuan untuk mencernakan berbagai pengalaman dalam kehidupan. Kemampuan berkoordinasi dan berorganisasi dimaknai sebagai kemampuan berinteraksi secara sosial. Kemampuan beradaptasi dimaknai sebagai kemampuan kesadaran untuk secara kreatif mengatasi tantangan keadaan, tantangan zaman, dan tantangan berbagai

---

<sup>4</sup> Edi S. Ekadjati, *Op. Cit.*, hal. 8.

ragam pergaulan. Kemampuan mobilitas dimaknai sebagai kemampuan untuk dengan kreatif menciptakan mobilitas sosial, politik, dan ekonomi, baik yang bersifat horizontal maupun vertikal. Kemampuan tumbuh dan berkembang diartikan sebagai kemampuan kesadaran untuk selalu maju, selalu bertambah luas dan dalam wawasannya selalu menawarkan paradigma-paradigma yang segar dan baru. Kemampuan regenerasi dimaknai sebagai kemampuan untuk mendorong munculnya generasi baru yang kreatif dan produktif.<sup>5</sup>

Di samping daya hidup, unsur lain lagi yang juga penting dalam suatu kebudayaan adalah mutu hidup. Mutu hidup bukanlah merupakan kesempurnaan tetapi lebih dimaknai sebagai kewajaran. Adapun kewajaran dalam hidup manusia merupakan harmoni tiga mustika yakni, tanggung jawab kepada kewajiban, idealisme, dan spontanitas. Tanggung jawab kepada kewajiban dimaknai sebagai sebuah kesadaran untuk selalu melaksanakan kewajiban-kewajiban secara penuh sesuai dengan tanggung jawab sosialnya. Idealisme dimaknai sebagai rumusan sikap hidup seseorang di dalam menempuh padang dan hutan belantara kehidupan. Idealisme sekaligus merupakan sumber kepuasan batin seseorang. Spontanitas dimaknai sebagai ungkapan naluri dan intuisi manusia. Tanpa spontanitas akan menyebabkan hidup menjadi kering dan hambar.

### **Mencermati Kebudayaan Sunda**

Kebudayaan Sunda termasuk salah satu kebudayaan suku bangsa di Indonesia yang berusia tua. Bahkan dibandingkan dengan kebudayaan Jawa sekalipun, kebudayaan Sunda sebenarnya termasuk kebudayaan yang berusia relatif

---

<sup>5</sup> W.S. Rendra. 1991. "Renungan Dasar tentang Kebudayaan". Makalah disampaikan dalam Kongres

lebih tua, setidaknya dalam hal proses pengenalan terhadap budaya tulisan. “Kegemilangan” Kebudayaan Sunda di masa lalu, khususnya semasa Kerajaan Tarumanegara<sup>6</sup> dan Kerajaan Sunda,<sup>7</sup> dalam perkembangannya kemudian seringkali dijadikan acuan dalam memetakan apa yang dinamakan Kebudayaan Sunda. Kebudayaan Sunda yang ideal pun kemudian sering dikaitkan sebagai kebudayaan raja-raja Sunda di masa lalu. Dalam kaitan ini, jadilah sosok kontroversial Prabu Siliwangi dijadikan sebagai tokoh panutan masyarakat Sunda karena dipandang sebagai raja Sunda yang berhasil, sekaligus mampu memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya.

---

Kebudayaan IV, Jakarta, 29 Oktober – 3 November 1991, hal. 2-4.

<sup>6</sup> Kerajaan Tarumanegara berdiri pada abad ke-5. Keberadaan Tarumanegara sebagai salah satu kerajaan tertua di Indonesia setidaknya dibuktikan oleh tujuh buah prasasti batu; Prasasti Tugu, Prasasti Ciaruteun, Prasasti Kebon Kopi, Prasasti Jambu (Pasir Koleangkak), Prasasti Pasir Awi, Prasasti Pasir Muara, dan Prasasti Cidanghiang. Ayatrohaedi. 1975. “Tarumanegara” dalam Atja (ed.), Sejarah Jawa Barat. Bandung: Proyek Penunjang Kebudayaan Nasional, hal. 27. Tujuh buah prasasti yang menjadi pertanda Kerajaan Tarumanegara merupakan fakta tak terbantahkan tentang telah tuanya perkenalan *urang* Sunda dengan budaya tulisan, sekaligus pula tentang telah tuanya perkenalan *urang* Sunda dengan roh kekuasaan. Reiza D. Dienaputra. 2003. “Pergumulan Kekuasaan Urang Sunda dalam Perspektif Demokrasi”. Makalah disampaikan dalam Seminar Sehari Fordimasi dengan tema, “Sunda dan Budaya Kekuasaan”, yang diselenggarakan Forum Dialog Mahasiswa Sejarah Islam se-Indonesia dan Himpunan Mahasiswa Sejarah dan Peradaban Islam Fakultas Adab KBM IAIN Sunan Gunung Djati, Bandung 7 April 2003.

<sup>7</sup> Kerajaan Sunda didirikan pada tahun 670 M, dengan rajanya yang pertama, Tarusbawa. Kerajaan Sunda atau Kerajaan Sunda Pajajaran sekaligus pula merupakan kerajaan Hindu-Budha di Indonesia yang usianya paling panjang. Selama 909 tahun eksistensinya, di Kerajaan Sunda Pajajaran telah terjadi 39 kali suksesi kepemimpinan atau rotasi kekuasaan. Dalam 39 kali suksesi kepemimpinan tersebut setidaknya ada lima model suksesi kepemimpinan yang terjadi. Pertama, dari raja kepada anak kandung laki-laki (25 kali). Kedua, dari raja kepada menantu (8 kali). Ketiga, dari raja kepada adik kandung (2 kali). Keempat, dari raja kepada saudara ipar (3 kali). Kelima, dari raja kepada keponakan (1 kali). Sementara itu dari 38 kali rotasi kekuasaan yang diketahui faktor penyebabnya, sebagian besar atau sebanyak 26 kali diakibatkan oleh faktor usia. Di luar itu, masih terdapat empat faktor penyebab terjadinya rotasi kekuasaan, yaitu, rotasi kekuasaan yang diakibatkan oleh terjadinya pelanggaran terhadap kaidah moral (3 kali), rotasi kekuasaan yang diakibatkan oleh adanya kudeta (5 kali), rotasi kekuasaan yang diakibatkan oleh pindahnya raja ke kerajaan lain (1 kali), serta rotasi kekuasaan yang diakibatkan oleh terbunuhnya raja yang tengah memerintah (3 kali). Reiza D. Dienaputra. 1991. “Suksesi Kepemimpinan di Kerajaan Sunda Pajajaran (670 – 1579 M)”. Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Sejarah dan Sastra Pakuan Pajajaran di Universitas Pakuan, Bogor, 11 – 13 November 1991; Uraian yang lebih lengkap, lihat, Reiza D. Dienaputra. 1993. Kerajaan Sunda Pajajaran: Studi tentang Suksesi Kepemimpinan di Kerajaan Sunda Pajajaran. Bandung: Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran, hal. 19-38.

Dalam perkembangannya yang paling kontemporer, Kebudayaan Sunda kini banyak mendapat gugatan kembali. Pertanyaan seputar eksistensi Kebudayaan Sunda pun sering kali mencuat ke permukaan. Apakah Kebudayaan Sunda masih ada? Kalau masih ada, siapakah pemiliknya? Pertanyaan seputar eksistensi Kebudayaan Sunda yang tampaknya provokatif tersebut, bila dikaji dengan tenang sebenarnya merupakan pertanyaan yang wajar-wajar saja. Mengapa demikian? Jawabannya sederhana, karena Kebudayaan Sunda dalam kenyataannya saat ini memang seperti kehilangan rohnya atau setidaknya tidak jelas arah dan tujuannya. Mau dibawa kemana Kebudayaan Sunda tersebut?

Kalaulah kemudian tujuh daya hidup kreasi Rendra digunakan untuk mengelaborasi Kebudayaan Sunda kontemporer maka setidaknya ada empat daya hidup yang perlu dicermati dalam Kebudayaan Sunda, yaitu, kemampuan beradaptasi, kemampuan mobilitas, kemampuan tumbuh dan berkembang, serta kemampuan regenerasi. Kemampuan beradaptasi Kebudayaan Sunda, terutama dalam merespon berbagai tantangan yang muncul, baik dari dalam maupun dari luar, dapat dikatakan memperlihatkan tampilan yang kurang begitu menggemblirakan. Bahkan Kebudayaan Sunda seperti tidak memiliki daya hidup manakala berhadapan dengan tantangan dari luar. Akibatnya, tidaklah mengherankan bila semakin lama semakin banyak unsur Kebudayaan Sunda yang tergilas oleh kebudayaan asing. Sebagai contoh paling jelas, bahasa Sunda yang merupakan bahasa komunitas *urang* Sunda tampak secara eksplisit semakin jarang digunakan oleh pemiliknya sendiri, khususnya para generasi muda Sunda. Lebih parah lagi, menggunakan bahasa Sunda dalam komunikasi sehari-hari kini sering diidentikan dengan “keterbelakangan”,

untuk tidak mengatakan primitif. Akibatnya, timbul rasa gengsi pada *urang* Sunda untuk menggunakan bahasa Sunda dalam pergaulannya sehari-hari.

Apabila kemampuan beradaptasi Kebudayaan Sunda memperlihatkan tampilan yang kurang begitu menggembirakan maka hal itu sejalan pula dengan kemampuan mobilitasnya. Kemampuan Kebudayaan Sunda untuk melakukan mobilitas, baik vertikal maupun horisontal, dapat dikatakan sangat lemah. Oleh karenanya, jangankan di luar komunitas Sunda, di dalam komunitas Sunda sendiri, Kebudayaan Sunda seringkali menjadi tampak asing. Meskipun ada unsur Kebudayaan Sunda yang memperlihatkan kemampuan untuk bermobilitas, baik secara horisontal maupun vertikal, tetapi secara umum kemampuan Kebudayaan Sunda untuk bermobilitas dapat dikatakan masih rendah sehingga Kebudayaan Sunda tidak saja tampak jalan di tempat tetapi juga berjalan mundur.

Berkaitan erat dengan dua kemampuan terdahulu, kemampuan tumbuh dan berkembang Kebudayaan Sunda juga dapat dikatakan memperlihatkan tampilan yang kurang begitu menggembirakan. Jangankan berbicara paradigma-paradigma baru, itikad untuk melestarikan apa yang telah dimiliki saja dapat dikatakan sangat lemah. Menjadi sebuah pertanyaan besar, komunitas Sunda yang sebenarnya kaya dengan folklor,<sup>8</sup> seberapa jauh telah berupaya untuk tetap melestarikan folklor tersebut agar tetap “membumi” dengan masyarakat Sunda. Kalaulah upaya untuk “membangkitkan” harta pusaka saja tidak ada bisa dipastikan paradigma baru untuk

---

<sup>8</sup> Folklor, yang merupakan hasil pengindonesiaan dari kata Inggris *Folklore*, dapat diartikan sebagai sebagian kebudayaan suatu kolektif, yang tersebar dan diwariskan turun-temurun, di antara kolektif macam apa saja, secara tradisional dalam versi yang berbeda, baik dalam bentuk lisan maupun contoh yang disertai dengan gerak isyarat atau alat pembantu pengingat (*mnemonic device*). James Danandjaja. 1997. *Folklor Indonesia: Ilmu Gosip, Dongeng, dan Lain-lain*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, hal. 2. Folklor dapat dibedakan dalam tiga bentuk, folklor lisan (bahasa rakyat, ungkapan tradisional, pertanyaan tradisional, sajak dan puisi rakyat, ceritera prosa rakyat; mite, legenda, dan,

membuat folklor tersebut agar sanggup berkompetisi dengan kebudayaan luar pun bisa jadi hampir tidak ada atau bahkan mungkin, belum pernah terpikirkan sama sekali. Biarlah folklor tersebut menjadi kenangan masa lalu *urang* Sunda dan biarkanlah folklor tersebut ikut terkubur selamanya bersama para pendukungnya, begitulah barangkali ucap *urang* Sunda yang tidak berdaya dalam merawat dan memberdayakan warisan leluhurnya.

Lemahnya daya hidup kebudayaan Sunda untuk tumbuh dan berkembang juga tampak di bidang politik. Perkembangan paling mutakhir memperlihatkan bahwa upaya untuk membuat budaya politik *urang* Sunda lebih berkualitas secara demokratis ternyata mendapat hambatan yang cukup berarti, terutama dari para elit penguasa yang sudah diuntungkan dengan sistem politik yang ada. Era otonomi yang memberi kekuasaan besar pada daerah untuk berbuat yang terbaik bagi kepentingan daerah, ternyata masih sulit dikembangkan di lapangan politik. Hal ini misalnya terlihat dalam proses pemilihan gubernur Jawa Barat yang baru saja bergulir. Ide untuk menunda pemilihan gubernur sampai lahirnya produk perundang-undangan yang memungkinkan proses pemilihan gubernur secara langsung oleh rakyat, tampaknya diantisipasi setengah hati oleh para elit politik. Dengan demikian, pelibatan *urang* Sunda untuk memilih gubernurnya secara langsung di Jawa Barat masih belum dapat terlaksana. Padahal, bila hal itu terlaksana bisa jadi *urang* Sunda akan menjadi contoh bagi daerah lainnya. Budaya politik *urang* Sunda pun secara otomatis akan segera dicatat dengan tinta emas sebagai budaya politik yang selalu memperlihatkan perkembangan kehidupan demokratis yang semakin berkualitas dari

---

dongeng, serta nyanyian rakyat), folklor sebagian lisan (kepercayaan rakyat dan permainan rakyat), dan folklor bukan lisan (makanan rakyat).

waktu ke waktu. Para leluhur Sunda pun tentunya akan bangga bahwa kini anak cucunya tidak hanya sekedar bisa memilih kepala desanya secara langsung tetapi juga bisa memilih gubernurnya secara langsung. Suatu pengalaman demokrasi yang sama sekali belum pernah dialami para leluhur *urang* Sunda.

Berkenaan dengan kemampuan regenerasi, Kebudayaan Sunda pun tampaknya kurang membuka ruang bagi terjadinya proses tersebut, untuk tidak mengatakan anti regenerasi. Budaya “kumaha akang”, “mangga tipayun”, yang demikian kental melingkupi kehidupan sehari-hari *urang* Sunda menjadi salah satu penyebab rentannya budaya Sunda dalam proses regenerasi. Akibatnya, jadilah budaya Sunda gagap dengan regenerasi. Generasi-generasi baru *urang* Sunda seperti tidak diberi ruang terbuka untuk berkompetisi dengan sehat, hanya dikarenakan kentalnya senioritas serta “terlalu majunya” pemikiran para generasi baru, yang seringkali bertentangan dengan pakem-pakem yang dimiliki generasi sebelumnya.<sup>9</sup> Akibat dari semua itu, tidaklah mengherankan bila suksesi kepemimpinan dalam berbagai bidang pun berjalan dengan tersendat-sendat.

Bila pengamatan terhadap daya hidup Kebudayaan Sunda melahikan temuan-temuan yang cukup memprihatinkan, maka hal yang sama juga terjadi manakala tiga mustika mutu hidup kreasi Rendra digunakan untuk menjelajahi

---

<sup>9</sup> Perlawanan terhadap budaya Sunda yang gagap regenerasi ini, seiring dengan *zeitgeist* reformasi, kini semakin sering disuarakan. Tuntutan agar generasi muda diberi ruang yang lebih luas untuk berkiprah juga semakin nyaring disuarakan. Satu di antaranya yang sempat hangat dalam sebulan terakhir ini, berkaitan dengan penunjukan anggota delegasi Jawa Barat untuk mengikuti Kongres Kebudayaan V di Bukittinggi, 20-23 Oktober 2003. Sistem penunjukan anggota delegasi yang tidak transparan, kewenangan “organisasi” Kalang Budaya Jawa Barat untuk menentukan anggota delegasi, serta masih digunakannya senioritas dalam pemilihan anggota delegasi menjadi salah satu masalah yang digugat oleh para budayawan di Jawa Barat. Pada perkembangan paling akhir, Gubernur Jawa Barat akhirnya tetap menyetujui anggota delegasi yang masih kontroversial tersebut untuk diberangkatkan ke Bukittinggi, yakni, Saini KM, Tony Djubiantono, Heyi Ma'mun, Wahyu Wibisana, Nina H. Lubis, Enoch Atmadibrata, Acil Darmawan, Aam Amalia, dan Yayat Hendayana. Pikiran Rakyat, 18 Oktober 2003, hal. 2.

Kebudayaan Sunda, baik itu mustika tanggung jawab terhadap kewajiban, mustika idealisme maupun mustika spontanitas. Lemahnya tanggung jawab terhadap kewajiban tidak saja diakibatkan oleh minimnya ruang-ruang serta kebebasan untuk melaksanakan kewajiban secara total dan bertanggung jawab tetapi juga oleh lemahnya kapasitas dalam melaksanakan suatu kewajiban. Hedonisme yang kini melanda Kebudayaan Sunda telah mampu menggeser parameter dalam melaksanakan suatu kewajiban. Untuk melaksanakan suatu kewajiban tidak lagi didasarkan atas tanggungjawab yang dimilikinya tetapi lebih didasarkan atas seberapa besar materi yang akan diperolehnya apabila suatu kewajiban dilaksanakan. Bila ukuran kewajiban saja sudah bergeser pada hal-hal yang bersifat materi, janganlah berharap bahwa di dalamnya masih ada apa yang disebut mustika idealisme. Para hedonis dengan kekuatan materi yang dimilikinya, sengaja atau tidak sengaja, semakin memupuskan idealisme dalam Kebudayaan Sunda. Akibatnya, jadilah betapa sulitnya komunitas Sunda menemukan sosok-sosok yang bekerja dengan penuh idealisme dalam memajukan Kebudayaan Sunda.

Berpijak pada kondisi lemahnya daya hidup dan mutu hidup kebudayaan Sunda, timbul pertanyaan besar, apa yang salah dengan Kebudayaan Sunda? Untuk menjawab ini banyak argumen bisa dikedepankan. Tapi dua di antaranya yang tampaknya bisa diangkat ke permukaan sebagai faktor berpengaruh paling besar adalah karena ketiadaan strategi dalam mengembangkan kebudayaan Sunda serta lemahnya tradisi, baca, tulis, dan lisan (baca, berbeda pendapat) di kalangan komunitas Sunda. Ketiadaan strategi kebudayaan yang benar dan tahan uji dalam mengembangkan kebudayaan Sunda tampak dari tidak adanya “pegangan bersama” yang lahir dari suatu proses yang mengedepankan prinsip-prinsip keadilan tentang

upaya melestarikan dan mengembangkan secara lebih berkualitas Kebudayaan Sunda. Kebudayaan Sunda tampaknya dibiarkan berkembang secara liar, tanpa ada upaya sungguh-sungguh untuk memandunya agar selalu berada di “jalan yang lurus”, khususnya manakala harus berhadapan dengan kebudayaan-kebudayaan asing yang galibnya terorganisir dengan rapi serta memiliki kemasan menarik. Berbagai unsur Kebudayaan Sunda yang sebenarnya sangat potensial untuk dikembangkan, bahkan untuk dijadikan model kebudayaan nasional dan kebudayaan dunia tampak tidak mendapat sentuhan yang memadai. Ambil contoh, berbagai makanan tradisional yang dimiliki *urang* Sunda, mulai dari lotek, karedok, bajigur, bandrek, surabi, colenak, wajit, borondong, kolontong, ranginang, opak, hingga yang lagi naik daun, ubi Cilembu, apakah ada strategi besar dari pemerintah daerah untuk mengemasnya dengan lebih bertanggung jawab agar bisa diterima komunitas yang lebih luas. Kalau Kolonel Sanders mampu mengemas ayam menjad demikian mendunia, mengapa *urang* Sunda tidak mampu melahirkan Mang Ujang, Kang Duyeh, ataupun Bi Eha dengan kemasan-kemasan makanan tradisional Sunda yang juga mendunia. Oleh karenanya, bila strategi kebudayaan benar-nenar telah dimiliki oleh Kebudayaan Sunda bisa jadi *urang* Sunda akan dengan bangga menemukan tempat-tempat makanan “enggal sayagi,” seperti Lotek Cilentah, Karedok Singaparna, Wajit Cililin, Borondong Majalaya, Bandrek Pangalengan, Bajigur Bogor, atau Opak Majalengka.

Lemahnya budaya baca, tulis, dan lisan ditenggarai juga menjadi penyebab lemahnya daya hidup dan mutu hidup Kebudayaan Sunda. Lemahnya budaya baca telah menyebabkan lemahnya budaya tulis. Lemahnya budaya tulis pada komunitas Sunda secara tidak langsung merupakan representasi pula dari lemahnya budaya

tulis dari bangsa Indonesia. Fakta paling menonjol dari semua ini adalah minimnya karya-karya tulis tentang Kebudayaan Sunda ataupun karya tulis yang ditulis oleh *urang* Sunda. Dalam kaitan ini, upaya Yayasan Rancage untuk memberikan penghargaan dalam tradisi tulis perlu mendapat dukungan dari berbagai elemen *urang* Sunda. Sayangnya, hingga saat ini pertumbuhan tradisi tulis pada *urang* Sunda masih tetap terbilang rendah. Menurut A. Chaedar Alwasilah dalam pidato pengukuhan yang disebutnya sebagai Pidato Provokatif Intelektual, setidaknya ada sebelas ayat sesat yang telah menyebabkan lemahnya budaya tulis. Pertama, anggapan bahwa literasi adalah kemampuan membaca. Kedua, anggapan bahwa mahasiswa tidak perlu diajari cara menulis. Ketiga, anggapan bahwa penguasaan teori menulis akan membuat siswa mampu menulis. Keempat, anggapan bahwa tidak mungkin mengajarkan menulis pada kelas-kelas besar. Kelima, anggapan bahwa menulis dapat diajarkan manakala siswa telah menguasai tata bahasa. Keenam, anggapan bahwa karangan yang sulit dipahami memperlihatkan kehebatan penulisnya. Ketujuh, anggapan bahwa menulis hanya dapat diajarkan manakala siswa sudah dewasa. Kedelapan, anggapan bahwa menulis karangan naratif dan ekspositoris harus lebih dahulu diajarkan daripada genre-genre lainnya. Kesembilan, anggapan bahwa pengajaran bahasa adalah tanggung jawab guru bahasa. Kesepuluh, anggapan bahwa menulis mesti diajarkan lewat perkuliahan bahasa. Kesebelas, anggapan bahwa bacaan atau pengajaran sastra hanya relevan bagi (maha) siswa fakultas sastra.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> A. Chaedar Alwasilah. 2003. "Bangsa Yang Besar adalah Bangsa Yang Menulis". Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Bidang Pendidikan Bahasa dan Sastra Inggris pada Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni Universitas Pendidikan Indonesia, 17 Oktober 2003, hal. 3-12.

Budaya lisan dalam Kebudayaan Sunda sebenarnya merupakan budaya yang telah lama akrab dengan komunitas Sunda, bahkan usianya jauh lebih tua dibandingkan dengan budaya bera dan tulisan. Namun budaya lisan dalam pengertian kapasitas untuk mengemukakan pendapat serta berjiwa besar dalam menghadapi pendapat yang berbeda masih merupakan barang yang masih amat sangat langka dalam Kebudayaan Sunda. Tradisi lisan Sunda tampaknya baru mampu menghargai komunikasi model monolog dan bukannya dialog. Akibatnya kemampuan untuk menyampaikan pendapat dan menerima pendapat yang berbeda dalam Kebudayaan Sunda merupakan barang yang teramat mewah. Padahal, kapasitas untuk mengemukakan pendapat dan menerima pendapat yang berbeda ini menjadi salah satu dasar bagi munculnya daya hidup dan mutu hidup kebudayaan yang berkualitas. Kapasitas mengemukakan pendapat pada dasarnya merupakan representasi dari kemampuan bernafas dan mencerna, sementara kapasitas menerima dengan jiwa besar pendapat yang berbeda lebih merupakan representasi dari kemampuan berkoordinasi dan berorganisasi, kemampuan beradaptasi, kemampuan mobilitas, kemampuan tumbuh dan berkembang, serta kemampuan regenerasi.